

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina menimbulkan banyak kecaman dan reaksi negatif dari berbagai negara khususnya negara barat seperti Amerika serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan sekutunya. Berbagai kebijakan telah diluncurkan oleh negara - negara barat dengan tujuan dapat meredam bahkan menghentikan invasi yang dilakukan oleh Rusia. Terdapat 2 opsi yang bisa dilakukan untuk mencoba meredam invasi Rusia kepada Ukraina. Pertama adalah “dialog” yang merupakan penyelesaian konflik dengan cara diplomasi yang damai, dan yang kedua adalah “sanksi” yang merupakan upaya penyelesaian konflik dengan cara pembatasan kerjasama ekonomi dan politik yang ketat antara negara pemberi sanksi dengan negara yang dianggap sebagai penyebab terjadinya konflik yang dalam kasus ini adalah Rusia dengan tujuan melemahkan perekonomian negara penyebab konflik agar memilih untuk menyerah dan menghentikan invasi yang dilakukannya kepada Ukraina (Putra et al., 2024).

Kerjasama yang terjalin di antara Rusia dan UE dalam bidang ekonomi dimulai pada tahun 1997 melalui penandatanganan *Partnership And Cooperation Agreement* (PCA) dengan fokus keamanan internasional perdamaian, norma demokrasi, dan kebebasan ekonomi termasuk di dalamnya adalah perdagangan minyak. Aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina sejak tahun 2014 dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional UE dan puncaknya pada tahun

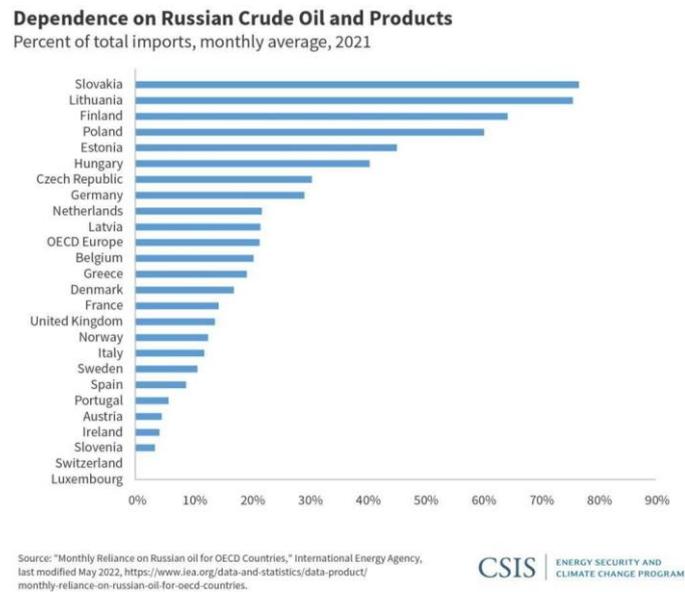
2022 pada bulan februari menjadi penyebab UE memberlakukan sanksi ekonomi termasuk embargo minyak dan gas sebagai bentuk melemahkan perekonomian Rusia dan menjadi penyebab kekacauan internal (Fahmi & Utomo, 2020). Rusia adalah salah satu negara pengekspor minyak dan gas alam terbesar di dunia setelah AS dan Arab Saudi (Ningrum, 2020). Sanksi yang dilayangkan AS dan UE berdampak sangat besar bagi industri minyak dan juga menurunkan perekonomian bagi kedua belah pihak.

Ketegangan yang terjadi di antara UE dan Rusia sebagai ekspor minyak utama dalam pasokan energi global tentunya mengalami dampak ekonomi yang signifikan pada embargo ini. Data yang diolah oleh peneliti melalui sumber IEA rentang tahun 2021 - 2023 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 - 2023 terjadi penurunan pada ekspor minyak Rusia ke UE akan tetapi walaupun menghadapi sanksi global ekspor yang dilakukan berada pada volume 7,5 juta barel tiap harinya. Rusia beralih ke pasar India Turki Timur Tengah dan Cina setelah kehilangan pasar di UE, UK dan AS (PortNews, 2023).

Negara UE seperti Slovakia, Hungaria, Republik Ceko, Turki, Latvia dan Italia telah meningkatkan persentase impor minyak rusia sejak 2021; Adapun negara-negara UE yang melakukan impor minyak Rusia dari bulan November 2021 ke Agustus 2022 mengalami peningkatan salah satunya yang tertinggi yakni Slovakia dari 73% menjadi 81%. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan beberapa negara UE mengurangi ketergantungan minyak Rusia. Secara signifikan Lithuania

mengalami penurunan persentase impor dari Rusia menjadi hanya 1% pada bulan Agustus 2022 sama halnya Finlandia yakni 8% (Cahill, 2022).

**Gambar 1. 1 Grafik Total Impor Minyak Rusia ke negara lainnya**



Sumber : [www.csis.org](http://www.csis.org), 2022

Ketergantungan minyak yang cukup tinggi antara Slovakia terhadap Rusia membuat UE melakukan pengecualian sementara bersama dengan negara Hongaria dan Republik Ceko dalam melakukan larangan impor minyak Rusia (Singarimbun & Nur, 2022). Hal ini dilakukan sebagai upaya kompromi atas negara negara anggota UE seperti Hungaria, Slovakia, dan juga Republik Ceko, yang bergantung pada impor melalui jalur pipa Druzhba (Sulastri, 2013). Walaupun demikian Slovakia tetap mencari solusi untuk mengurangi ketergantungan minyak Rusia. Pengecualian ini menjadi dasar adanya tekanan internasional dalam mengurangi ketergantungan minyak pada energi Rusia.

Pada tahun 2023 Slovakia meminta tambahan waktu satu tahun bagi UE untuk menghentikan ketergantungan minyak Rusia. Slovakia adalah salah satu negara UE yang memiliki ketergantungan tinggi pada Rusia untuk energinya dengan 60% gas alam, 70% minyak, dan seluruh bahan bakar nuklirnya berasal dari Moskow. Kilang minyak slovnaft yang dimiliki oleh Mol Hungaria selama ini hanya menggunakan minyak mentah Rusia. Perpanjangan waktu ini dilakukan untuk penyesuaian teknologi dalam menerima minyak mentah dari negara non-Rusia. Kilang tersebut juga melakukan pengiriman bahan bakar ke Ukraina sehingga Kyiv dapat memanfaatkan dalam upaya perang. Perpanjangan ini juga dapat dikaitkan dengan ketidakmampuan Mol untuk mempercepat diservikasi pemasoknya. Tentunya hal ini menjadikan Slovakia sebagai negara dengan infrastruktur energi penting yang dimiliki secara praktis oleh negara asing dan tidak memiliki kepentingan yang terlihat dalam membatasi ketergantungan ini. Maka dari itu ketergantungan minyak Rusia terhadap Slovakia akan dilakukan secara bertahap (Mišík & Oravcová, 2024). Walaupun begitu Slovakia akan tetap berdiri membela Ukraina dan mengecam tindakan yang dilakukan oleh Rusia.

Pada tahun 2024 impor minyak mentah Rusia di Slovakia mengalami penurunan dari 479,71 ribu ton pada bulan September 2024 menjadi 319,84 ribu ton pada bulan Oktober. Impor minyak mentah dari Rusia di Slovakia memiliki rata-rata 448.68 ribu ton dari tahun 2008 hingga 2024. Titik tertinggi sebesar 589,97 ribu pada bulan Agustus 2023 dan rekor terendah sebesar 68,58 ribu ton pada bulan Juni tahun 2024 ([Rusia - Produksi Minyak Mentah | 1992-2024 Data | 2025-2027](#)

[Perkiraan](#), 2025) . Setelah intervensi Rusia di Ukraina pada tahun 2022, Slovakia masih memiliki ketergantungan pada impor minyak dari Rusia, meskipun berbagai upaya diversifikasi sumber pasokan telah diusahakan, Hingga pertengahan tahun 2024, diperkirakan sekitar 70% pasokan minyak mentah Slovakia berasal dari Rusia yang terutama disalurkan melalui pipa Druzhba. Meskipun demikian, Slovakia telah mulai mengimpor minyak dari sumber-sumber alternative, seperti minyak Azeri yang dialirkan melalui pipa Adria yang melintasi Kroasia. Akan tetapi, kapasitas pipa Adria masih terbatas dan belum dapat sepenuhnya menggantikan pasokan dari Rusia.

Oleh karena itu, meskipun upaya diversifikasi pasokan sedang berjalan, Slovakia masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang signifikan terhadap minyak Rusia, sembari secara bertahap meningkatkan volume impor dari sumber alternative, seperti minyak Azerbaijan yang disalurkan melalui pipa Adria.

## **1.2. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini berdasar pada beberapa artikel atau jurnal yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama adalah penelitian jurnal yang berjudul “*SOCIAL-CONSERVATIVE RUSSIAN SOFT POWER: A TRADITIONAL AGENDA AND ILLIBERAL VALUES AS A SOURCE OF ATTRACTION OR COERCION? A CASE STUDY OF SLOVAKIA*” yang ditulis oleh Martin Solik, dari University of Ostrava, Czech Republic (Solik, 2020). Penelitian ini meninjau bagaimana peran Soft Power Rusia dalam mempertahankan daya tariknya atas negara-negara anggota UE terkait

dengan invasi yang mereka lakukan di Ukraina. Penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan-kebijakan yang dibuat Rusia terhadap negara-negara yang tidak berhubungan langsung terhadap invasi yang dilakukannya seperti Slovakia yang menjadi inti dari *study-case* ini.

Kedua, adalah artikel yang berjudul “*Slovakia’s Eastern policy – from the Trojan horse of Russia to “Eastern multivectoralism”*” yang ditulis oleh Marušiak (2013), artikel ini lebih berfokus pada hubungan diplomatik bilateral atau multilateral yang dilakukan oleh Slovakia terhadap negara-negara Eropa Timur termasuk Rusia. Artikel ini juga berfokus pada hubungan bilateral dengan Ukraina sebagai sesama anggota aktif di UE.

Ketiga, adalah Jurnal yang berjudul “*Policy persistence vis- à- vis a crisis: the curious case of Slovak energy policy after the Russian invasion of Ukraine*” yang ditulis oleh Mišik & Oravcová (2024). Jurnal ini lebih berfokus pada kebijakan yang diambil Slovakia untuk dapat terhindar dari krisis energi akibat invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Slovakia tetap bisa menjadi konsumen minyak bumi dan gas dari Rusia tetapi juga menunjukkan dukungannya terhadap kebebasan Ukraina.

Keempat, yaitu jurnal yang berjudul “*Unequal Partnership – Russia and Slovakia*” yang ditulis oleh Alexander deluba (2024) Menganalisis dinamika hubungan antara Rusia dan Slovakia yang secara formal setara, namun secara

faktual sangat asimetris. Menyoroti ketimpangan dalam ekonomi (ketergantungan Slovakia terhadap energi Rusia) dan keamanan (dominasi militer Rusia). Dengan tujuan menjelaskan bagaimana ketimpangan struktur bilateral ini membentuk strategi dan kepentingan masing-masing Negara (Caesario, 2022)

### **1.3. Perumusan masalah**

Slovakia adalah salah satu korban tidak langsung dari invasi yang dilakukan Rusia oleh Ukraina. Hal ini terjadi karena salah satu sumber utama energi minyak bumi dan gas alam yang dibutuhkan Slovakia berasal dari Rusia. Maka dari itu, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu “Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri minyak Slovakia dalam menghadapi krisis energi tahun 2022-2024? “

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini berfokus kepada negara-negara di UE dan lebih berfokus pada Slovakia. Maka dengan penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan penulis yaitu:

#### **1.4.1. Secara Umum**

Tujuan penelitian ini dibuat berdasarkan pemenuhan kebutuhan perolehan Gelar Sarjana Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

#### **1.4.2 Secara Khusus**

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri minyak Slovakia dalam menghadapi krisis energi tahun 2022 - 2024.

## **1.5. Landasan Teori**

### **1.5.1. Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri**

Pengertian Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri atau *Foreign Policy Change* telah didefinisikan oleh berbagai ahli. Kebijakan luar negeri (foreign policy) merupakan salah satu bidang kajian utama dalam studi hubungan internasional. Istilah ini mengacu pada strategi dan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain dan aktor internasional, dalam rangka mencapai tujuan nasional di ranah global. Di balik setiap kebijakan luar negeri terdapat seperangkat teori dan pendekatan yang membantu menjelaskan proses pembentukannya, dinamika pelaksanaannya, dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

Menurut James N. Rosenau (1976), foreign policy adalah “sistem tindakan yang berkembang dari lingkungan domestik dan internasional suatu negara dan dipengaruhi oleh persepsi serta preferensi para pembuat kebijakan.” Dalam pandangan ini, kebijakan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari interaksi antara struktur dan aktor, baik dalam konteks internal maupun eksternal. Teori-teori kebijakan luar negeri berusaha mengurai hubungan kompleks ini melalui pendekatan yang berbeda.

Salah satu teori utama dalam studi foreign policy adalah realisme, yang berakar pada asumsi bahwa negara adalah aktor utama dalam sistem internasional yang anarkis, dan bahwa negara bertindak rasional untuk mengejar kepentingan

nasionalnya, terutama dalam hal kekuasaan dan keamanan (Morgenthau, 1948). Dalam kerangka realis, kebijakan luar negeri dipandang sebagai alat untuk mempertahankan kedaulatan dan memperkuat posisi negara dalam sistem internasional yang kompetitif.

Sebagai tandingan dari pendekatan realis, liberalisme menawarkan perspektif yang lebih kompleks mengenai perilaku negara. Teori ini menekankan peran institusi internasional, norma hukum, kerja sama antarnegara, serta pengaruh aktor non-negara seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional. Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye (1977), hubungan internasional modern diwarnai oleh keterkaitan yang kompleks (*complex interdependence*), sehingga kebijakan luar negeri juga mencerminkan dinamika ekonomi, sosial, dan politik global yang saling terhubung.

Sementara itu, pendekatan konstruktivis memusatkan perhatian pada pentingnya identitas, nilai, dan norma dalam membentuk preferensi negara. Dalam pandangan ini, kebijakan luar negeri bukan hanya soal kepentingan material, melainkan juga tentang bagaimana negara memahami dirinya sendiri dan orang lain. Seperti yang dikemukakan Alexander Wendt (1999), “struktur internasional dibentuk oleh ide dan bukan hanya oleh kekuatan material.” Oleh karena itu, *foreign policy* dipahami sebagai produk konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh wacana dan persepsi kolektif.

Dalam pendekatan yang lebih mikro, muncul pula teori peran nasional (national role conception) seperti yang dikembangkan oleh Holsti (1970), yang menyatakan bahwa para pengambil kebijakan seringkali bertindak berdasarkan persepsi subjektif mengenai “peran” yang seharusnya dimainkan negaranya di panggung internasional. Misalnya, negara dapat memandang dirinya sebagai penjaga perdamaian, pemimpin kawasan, atau pelindung nilai-nilai demokrasi, dan persepsi ini sangat menentukan arah kebijakan luar negerinya.

Di luar itu, terdapat pula pendekatan birokratik dan psikologis, yang menyoroti pentingnya proses pengambilan keputusan internal negara. Menurut Allison & Zelikow (1999) dalam bukunya *Essence of Decision*, keputusan kebijakan luar negeri tidak hanya ditentukan oleh kalkulasi rasional, tetapi juga oleh dinamika antar lembaga, persepsi pribadi pemimpin, dan bahkan kesalahan kognitif seperti bias dan mispersepsi.

Dengan demikian, teori kebijakan luar negeri mencakup spektrum pendekatan yang luas, mulai dari fokus struktural hingga pada individu. Masing-masing teori memberikan lensa yang berbeda dalam memahami bagaimana negara bertindak di arena internasional. Kombinasi dari berbagai perspektif ini sangat penting untuk menghasilkan analisis yang lebih utuh dan komprehensif terhadap perilaku negara dalam sistem global.

Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri atau *Foreign Policy Change* adalah teori yang dikemukakan pertama kali oleh Joakim Eidenfalks. Teori ini menyatakan bahwa pengambilan sebuah kebijakan luar negeri di perngaruhi oleh beberapa faktor. Joakim membaginya menjadi dua kategori besar yaitu faktor Domestik atau Internal dan juga Internasional atau Eksternal, faktor-faktor ini cenderung memiliki kekuatan yang sama rata tergantung pada studi kasusnya, walaupun salah satu faktor dapat lebih mempengaruhi dari faktor yang lain (Eidenfalks, 2006). Maka dari itu, Joakim menyimpulkan bahwa perlunya untuk mempertimbangkan kebijakan- kebijakan domestik yang dibuat suatu negara untuk mempertimbangkan perubahan kebijakan luar negeri, karena kedua nya pasti memiliki suatu keterkaitan.

#### **1.5.1.1. Faktor Domestik**

Dalam teori kebijakan luar negeri, faktor domestik merujuk pada elemen- elemen internal suatu negara yang mempengaruhi arah, isi, dan proses pengambilan keputusan kebijakan luar negerinya. Meskipun hubungan internasional sering dianggap sebagai interaksi antarnegara, kenyataannya kebijakan luar negeri tidak pernah terbentuk secara terpisah dari kondisi domestik. Faktor-faktor seperti sistem politik, opini publik, media, kelompok kepentingan, kondisi ekonomi, hingga karakter kepemimpinan, semuanya membentuk konteks internal yang menentukan bagaimana suatu negara menanggapi dinamika global.

Salah satu aspek penting dari faktor domestik adalah struktur politik dan institusi pemerintahan. Negara dengan sistem demokrasi, misalnya, cenderung memiliki proses pembuatan kebijakan luar negeri yang lebih terbuka terhadap

pengaruh masyarakat sipil, parlemen, dan media. Sebaliknya, dalam sistem otoriter, keputusan kebijakan luar negeri biasanya lebih tersentralisasi dan bergantung pada kepemimpinan individu atau elit tertentu.

Kelompok kepentingan dan opini publik juga memainkan peran penting. Di era globalisasi dan keterbukaan informasi, tekanan dari serikat pekerja, pengusaha, organisasi lingkungan, serta masyarakat umum dapat memengaruhi pilihan diplomatik suatu negara, terutama dalam isu-isu yang menyentuh kepentingan nasional secara langsung. Faktor domestik juga bekerja melalui proses psikologis dan persepsi para pengambil kebijakan. Pemimpin negara tidak hanya merespons kondisi internasional, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana keputusan luar negeri mereka akan diterima di dalam negeri—baik oleh publik, partai politik, maupun elit ekonomi.

Faktor Domestik mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara. Hal ini dikarenakan suatu pemimpin pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi yang ada di negaranya untuk dapat merumuskan atau menjalankan suatu kebijakan luar negeri (Sambikal, 2023). Joakim mengidentifikasi ada lima sumber perubahan yang dapat dikategorikan sebagai faktor Domestik, yaitu Birokrasi, Opini Publik, Media, Kelompok Kepentingan dan juga Partai Politik.

#### **1.5.1.1.1. Birokrasi**

Dalam studi hubungan internasional, birokrasi dipahami sebagai salah satu faktor domestik paling berpengaruh dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Birokrasi tidak hanya berperan sebagai pelaksana keputusan politik, tetapi juga sebagai aktor dengan kepentingan, interpretasi, dan preferensi tertentu terhadap isu-isu internasional. Model bureaucratic politics yang dikembangkan oleh Graham Allison dan Morton Halperin menunjukkan bahwa keputusan luar negeri merupakan hasil kompromi dan pertarungan antar lembaga pemerintahan, bukan keputusan tunggal yang rasional dari pemimpin tertinggi negara (Allison & Halperin, *World Politics*, 1972).

Dalam kerangka empiris menunjukkan bahwa karakteristik birokrasi seperti umur organisasi, profesionalisme, dan kompleksitas berpengaruh terhadap intensitas dan gaya respons kebijakan luar negeri suatu negara. Negara-negara dengan birokrasi luar negeri yang matang dan terorganisir cenderung bersikap lebih koheren dan strategis dalam mengambil keputusan, dibandingkan negara dengan birokrasi yang terfragmentasi (Hermann, 1974). Dengan kata lain, kekuatan birokrasi turut menentukan konsistensi dan keberlanjutan strategi luar negeri suatu negara.

Birokrasi dalam hal ini merujuk pada individu atau organisasi dalam suatu lembaga yang memiliki andil dalam suatu penyusunan atau pelaksanaan suatu kebijakan (Sumardi, 2021). Joakim menulis bahwa suatu individu atau grup yang

berpengaruh dalam sebuah pemerintahan yang memiliki akses ke pembuat kebijakan memiliki andil besar dalam hal hal pembuatan suatu kebijakan. Dalam hal ini Joakim memberikan salah satu contoh penelitian milik Kalevi J. Holsti. Dimana dalam penelitiannya Kalevi mengangkat sebuah studi perubahan kebijakan luar negeri *Post-World War* dan membaginya menjadi delapan *study-case*, dan salah satunya adalah peran dari suatu birokrasi yang terdiri dari individu atau kelompok yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (James., 1982).

Sebagai tambahan, para akademisi dalam bidang hubungan internasional juga menyoroti bahwa birokrasi dalam sistem pemerintahan demokratis dan otoriter dapat memainkan peran yang berbeda. Dalam pemerintahan otoriter, birokrasi sering kali lebih terpusat pada kekuasaan eksekutif dan dapat lebih mudah diakses oleh pengambil keputusan utama. Sebaliknya, dalam sistem demokratis, ada lebih banyak mekanisme checks and balances yang mengatur interaksi antara birokrasi dan pejabat terpilih, meskipun birokrasi tetap memiliki kekuatan pengaruh melalui keahlian teknis dan administrasi mereka (Harris, 1996). Hal ini membuktikan bahwa tidak ada satu model birokrasi yang dapat diterapkan secara universal, dan pengaruh birokrasi sangat bergantung pada konteks politik masing-masing negara. Hal ini lah yang menjadi dasar bukti peran penting suatu birokrasi dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, memahami birokrasi sebagai faktor domestik memberikan wawasan penting tentang bagaimana kebijakan luar negeri sebenarnya dirumuskan dan dijalankan. Bukan hanya refleksi kepentingan nasional semata, tetapi hasil dari proses internal yang kompleks di dalam tubuh negara.

#### **1.5.1.1.2. Opini Publik**

Masyarakat memiliki kekuatan yang besar dalam suatu negara, hal inilah yang mendasar bagaimana suatu keinginan masyarakat sangat berperan penting bagi suatu pemerintahan. Maka dari itu Joakim menyatakan bahwa pengambilan suatu kebijakan tidak bisa diambil tanpa mempertimbangkan opini publik. Joakim juga menyatakan bahwa masyarakat terlibat secara langsung atas kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintahan.

Maka dari itu, pengambilan suatu kebijakan yang memuaskan masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari kericuhan dari kemarahan masyarakat. Dukungan yang baik dari masyarakat juga dapat berimbas pada mudahnya perealisasiian suatu kebijakan. Akan tetapi, suatu kebijakan dapat diputuskan secara langsung dan mengesampingkan faktor opini publik, yaitu saat dimana dibutuhkannya pengambilan keputusan secara cepat di kondisi darurat (Wahab, 2021). Dalam kategori ini Joakim mencontohkan peristiwa Bom Bali dan juga Perang Irak dimana terdapat suatu kondisi darurat yang menyebabkan pemerintah untuk secara cepat mengambil suatu keputusan dan mengesampingkan faktor opini publik. Pada kondisi darurat tersebut opini publik mulai bermunculan dan

menanggapi keputusan tersebut pasca pengambilan keputusan. Keputusan yang muncul dapat berisi pro maupun kontra.

#### **1.5.1.1.3. Media**

Media adalah kategori yang menjembatani Pemerintah dan juga masyarakat. Joakim mengungkapkan bahwa, masa dimana mudahnya masyarakat mengakses media menyebabkan banyaknya pemerintahan yang melakukan kontrol terhadap media yang ada (Lubis, 2023).

Media berperan dalam membentuk konteks domestik di mana kebijakan luar negeri dikembangkan dan dilaksanakan. Dalam hal ini, media tidak hanya bertindak sebagai saluran pasif yang menyampaikan kebijakan pemerintah kepada publik, tetapi juga sebagai aktor aktif yang dapat menetapkan agenda (agenda setting), membingkai isu (framing), dan memobilisasi dukungan atau penolakan terhadap tindakan luar negeri tertentu.

Kontrol ini dilakukan untuk membantu pemerintah dalam hal menjaga opini publik agar tetap berpihak pada pemerintah dan tetap mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tetapi dilain sisi, Joakim juga menuturkan bahwa media juga bisa menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai kebijakan luar negeri yang berpotensi merugikan masyarakat. Media juga dapat menjadi forum diskusi bagi masyarakat untuk dapat menanggapi atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tanggapan tersebut dapat berupa dukungan ataupun penolakan terhadap

kebijakan yang diambil. Media juga dapat menjadi tempat bagi oposisi untuk menggiring opini publik agar tidak sejalan dengan pemerintah.

Beberapa teori lain, turut mendukung media sebagai factor domestik. Menurut teori agenda-setting yang dikembangkan oleh McCombs dan Shaw (1972), media memiliki pengaruh kuat dalam menentukan isu mana yang dianggap penting oleh publik. Ketika media secara intensif meliput konflik, krisis, atau peristiwa luar negeri, perhatian publik meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong pemerintah untuk merespons dalam bentuk kebijakan tertentu. Dalam konteks ini, media bertindak sebagai gatekeeper yang menentukan informasi mana yang masuk ke dalam diskursus nasional.

Selain itu, teori framing menjelaskan bagaimana media membentuk cara pandang publik terhadap isu-isu luar negeri. Seperti dijelaskan oleh Entman (1993), framing melibatkan penekanan, eksklusi, dan penafsiran terhadap elemen-elemen tertentu dari suatu isu. Framing dapat memberikan narasi tertentu, misalnya menggambarkan suatu negara sebagai musuh, korban, atau mitra strategis. Narasi ini berpotensi membatasi ruang gerak pembuat kebijakan, terutama dalam sistem demokratis di mana opini publik memiliki pengaruh signifikan. Maka dari itu, media memiliki andil yang sangat penting untuk mempengaruhi opini publik yang juga dapat menambah tekanan pada pemerintah dalam mengambil suatu keputusan kebijakan.

#### **1.5.1.1.4. Kelompok Kepentingan**

Dalam artikelnya berjudul “Foreign Policy Decision-Making: Rational, Psychological and Neurological Models” (2016), Joakim menjelaskan bahwa kelompok kepentingan dapat memberikan tekanan langsung maupun tidak langsung terhadap pengambil keputusan melalui lobi, kampanye media, dan mobilisasi opini publik. Mereka bertindak sebagai jembatan antara masyarakat sipil dan elit politik, terutama dalam isu-isu yang berdampak ekonomi, keamanan, dan identitas nasional.

Dalam tulisannya, Joakim mendefinisikan suatu kelompok kepentingan berdasarkan pandangan dari Robert H. Salisbury. Kelompok Kepentingan ini adalah suatu asosiasi yang terorganisir yang terlibat dalam aktivitas pengambilan keputusan. Mengutip tulisan Joakim bahwa kelompok ini dibentuk oleh kumpulan warga negara yang terorganisir berdasar pada isu tertentu, serta lobi-lobi profesional, bisnis dan firma hukum kepentingan publik. Di era modern ini terjadi peningkatan kekuatan kelompok kepentingan dikarenakan mudahnya dalam menyatukan suara dengan dukungan media (Zuhdi, 2020).

Joakim juga menekankan bahwa meskipun pengaruh kelompok kepentingan bukan satu-satunya faktor, mereka sering kali menjadi variabel penentu dalam keputusan yang bersifat kontroversial atau mendesak. Oleh karena itu, dalam teori kebijakan luar negeri kontemporer, kelompok kepentingan dipandang sebagai aktor domestik yang berperan aktif dan tidak bisa diabaikan. Hal inilah yang mendasari

pentingnya untuk melibatkan kelompok kepentingan dalam pembuatan kebijakan mengenai isu tersebut.

#### **1.5.1.1.5. Partai Politik**

Partai politik memiliki peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri sebuah negara. Meski kebijakan luar negeri sering dianggap sebagai domain elit atau eksekutif, partai politik sebagai institusi demokratis tetap mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui posisi dalam pemerintahan, partai mempengaruhi arah dan isi kebijakan luar negeri berdasarkan ideologi, kepentingan konstituennya, serta konteks politik domestik.

Dalam teori hubungan internasional, khususnya perspektif liberal dan neoklasik realis, terdapat pengakuan bahwa aktor domestic termasuk partai politik — memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Menurut Putnam (1988), pengambilan keputusan luar negeri adalah hasil dari permainan dua level: di level domestik dan internasional. Dalam konteks domestik, partai politik berfungsi sebagai mediator antara rakyat dan pengambil kebijakan luar negeri.

Salah satu faktor utama adalah orientasi ideologis partai. Partai konservatif cenderung mendukung kebijakan luar negeri berbasis kepentingan nasional, kekuatan militer, dan kedaulatan. Sebaliknya, partai progresif atau sosial-demokrat lebih mendukung pendekatan multilateral, diplomatik, dan berbasis nilai-nilai

universal seperti hak asasi manusia.

Partai politik dalam tulisan Joakim mengacu pada partai politik di parlemen yang secara langsung terlibat dalam penyusunan dan pengambilan suatu keputusan kebijakan. Partai politik memiliki kepentingan yang nyata untuk tetap pada jalurnya, maka dari itu partai politik memerlukan dukungan pemerintah untuk dapat tetap pada jalurnya (Labolo, 2015). Partai politiklah yang mengangkat suatu individu atau kelompok menjadi pengambil keputusan di pemerintahan, maka dari itu perlunya kepala negara atau pengambil keputusan untuk tetap mempertimbangkan keinginan partai politik.

Partai politik oposisi juga termasuk dalam kategori ini, dalam tulisan Joakim mengungkapkan bahwa partai politik oposisi memberikan tekanan yang signifikan pada parlemen dan dapat mempengaruhi opini publik atas penyusunan suatu kebijakan. Terjadinya penolakan terhadap suatu kebijakan dapat berimbas pada sulitnya perealisasi kebijakan.

#### **1.5.1.2. Faktor Internasional**

Di era globalisasi ini telah berhasil mengaburkan garis nasional yang menjadikan perlunya suatu negara untuk tetap mempertimbangkan aktor-aktor lain di luar negaranya. Kebijakan luar negeri suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika domestik, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal yang berasal dari sistem internasional. Dalam kerangka teori kebijakan luar negeri, faktor

internasional merujuk pada tekanan, peluang, dan ancaman yang datang dari lingkungan global, termasuk konstelasi kekuatan, perjanjian internasional, posisi geografis, dan dinamika antarnegara.

Joakim menyoroti bahwa pemimpin negara tidak hanya merespons tekanan internasional secara rasional, tetapi juga berdasarkan persepsi, nilai, dan pengalaman sebelumnya. Artinya, faktor internasional bekerja melalui proses interpretasi yang dipengaruhi oleh latar belakang kognitif dan psikologis pembuat kebijakan. Oleh karena itu, kendati sistem internasional dapat menghadirkan tekanan nyata, respons terhadap tekanan tersebut bisa sangat bervariasi tergantung pada bagaimana kepentingan nasional diartikulasikan.

Lebih lanjut, Joakim mengintegrasikan pendekatan rasional dan psikologis dalam menjelaskan bagaimana aktor negara menyusun prioritas luar negerinya di tengah lingkungan global yang kompleks. Menurutnya, aktor negara akan menimbang tujuan internasionalnya dengan mempertimbangkan posisi negara lain, peluang kerja sama, serta potensi konflik. Dalam konteks ini, kepentingan internasional menjadi hasil interaksi antara posisi negara dalam sistem internasional dan strategi aktor domestik yang menavigasi realitas tersebut.

faktor internasional bukanlah sekadar variabel struktural, melainkan juga dimensi yang dinamis dan dipolitisasi. Misalnya, tekanan dari negara besar atau sanksi internasional bisa saja mendorong negara kecil untuk menyesuaikan

kebijakan luar negerinya, namun dalam banyak kasus, negara juga bisa memanipulasi faktor eksternal untuk memperkuat legitimasi domestik.

Faktor internasional ini tidak hanya menekankan pada hubungan antar negara melainkan juga aktor-aktor *non-state* yang juga dapat berperan pada pembentukan kebijakan luar negeri (Pujayanti, 2018). Dalam tulisannya Joakim membagi faktor internasional menjadi empat kategori yaitu, Faktor Global, Faktor regional, Hubungan Bilateral dan aktor-aktor non-negara.

#### **1.5.1.2.1. Faktor Global**

Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor global yang tidak hanya bersifat langsung atau domestik, tetapi juga mencakup dinamika internasional yang lebih luas. Faktor-faktor global ini mencakup peristiwa internasional besar, seperti konflik, krisis ekonomi, perubahan iklim, serta pengaruh kekuatan besar dan aliansi internasional. Menurut Nye (2004), dalam konteks hubungan internasional, faktor global mencakup peran negara besar dalam membentuk norma-norma dan kebijakan global, serta bagaimana negara-negara kecil atau menengah merespons dinamika internasional ini. Negara-negara tidak hanya merumuskan kebijakan luar negeri berdasarkan kepentingan nasional mereka sendiri, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana dunia internasional mempengaruhi keamanan, ekonomi, dan stabilitas negara mereka (Nye, 2004).

Dalam teori kebijakan luar negeri, faktor internasional memainkan peran penting dalam membentuk kepentingan dan strategi negara dalam menghadapi lingkungan eksternal. Salah satu dimensi utama dari faktor internasional adalah faktor global, yaitu kondisi dan dinamika sistem internasional secara menyeluruh yang melampaui wilayah geografis atau isu regional tertentu. Joakim Eidenfalk, dalam tulisannya “Foreign Policy Decision-Making: Rational, Psychological and Neurological Models” (2016), menyatakan bahwa faktor global menciptakan kerangka struktural dan perseptual yang memengaruhi cara negara memformulasikan kebijakan luar negeri mereka.

Menurut peneliti, faktor global mencakup elemen-elemen seperti perubahan dalam tatanan internasional, globalisasi ekonomi, krisis iklim, pandemi, serta transformasi teknologi yang mempengaruhi hubungan antarnegara. Dalam kerangka ini, negara tidak hanya merespons kejadian global secara pasif, melainkan secara aktif menyesuaikan kepentingan luar negeri mereka dengan realitas dan ekspektasi global yang berubah. Dengan kata lain, kepentingan internasional negara terbentuk melalui interpretasi terhadap tantangan dan peluang global yang terus berkembang.

Eidenfalk menekankan bahwa dalam menghadapi faktor global, proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri menjadi semakin kompleks. Para pembuat kebijakan tidak hanya mempertimbangkan logika rasional berbasis kepentingan nasional semata, tetapi juga mempertimbangkan dinamika kognitif dan

psikologis, termasuk persepsi terhadap ancaman global dan tekanan normatif dari komunitas internasional. Misalnya, dalam isu perubahan iklim atau keamanan siber, negara sering kali terdorong untuk mengambil kebijakan luar negeri yang sejalan dengan norma global untuk mempertahankan legitimasi internasional.

Faktor global juga menciptakan bentuk baru ketergantungan dan interdependensi antarnegara. Dalam dunia yang saling terhubung melalui ekonomi digital, jaringan pasokan global, dan regulasi internasional, negara tidak dapat sepenuhnya mengandalkan strategi unilateral. Sebaliknya, mereka harus mempertimbangkan dampak dari keputusan luar negeri terhadap tatanan global secara keseluruhan. Eidenfalk menyebut hal ini sebagai mekanisme adaptasi strategis, di mana negara harus menyeimbangkan tujuan domestik dengan struktur kekuatan dan norma global.

Lebih jauh, Eidenfalk menggarisbawahi pentingnya peran aktor global non-negara—seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan masyarakat sipil transnasional—yang turut membentuk konfigurasi faktor global. Keberadaan dan tekanan dari aktor-aktor ini membuat negara harus lebih responsif terhadap agenda internasional yang bersifat kolektif, seperti hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, dan keamanan global (Eidenfalk J. , 2016).

Dalam tulisannya Joakim menuturkan terdapat beberapa faktor global yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Faktor global

ini berdasar pada suatu isu atau peristiwa global dimana dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu negara walaupun mereka tidak terdampak secara langsung. Dalam tulisannya Joakim mencontohkan peristiwa 11 September di AS dimana secara tegas menyatakan “*War on Terror*” yang berhasil mempengaruhi berbagai negara-negara yang berhubungan atau tidak berhubungan secara langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

Dengan demikian, dalam pandangan Joakim Eidenfalk, faktor global merupakan struktur dan proses dinamis yang memengaruhi orientasi, persepsi, dan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Pemahaman terhadap faktor global tidak hanya diperlukan untuk memahami konteks eksternal, tetapi juga untuk menilai bagaimana negara membentuk identitas dan strategi mereka dalam sistem internasional yang terus berubah.

#### **1.5.1.2.2. Faktor Regional**

Faktor regional adalah faktor yang terdiri dari lembaga- lembaga regional antar negara yang juga memberikan tekanan tersendiri terhadap pembuatan kebijakan (Daniah, 2018). Joakim Eidenfalk dalam artikelnya “Foreign Policy Decision-Making: Rational, Psychological and Neurological Models” (2016) menyoroti pentingnya konteks regional sebagai bagian dari kalkulasi kepentingan luar negeri negara. Joakim menuturkan bahwa faktor regional ini dapat terjalin atas persamaan geografis, nilai-nilai budaya, sejarah ataupun adat tradisi. Lingkungan regional berperan sebagai kerangka rujukan di mana aktor negara menilai posisi

strategisnya. Aliansi regional, konflik antarnegara tetangga, serta keberadaan organisasi kawasan seperti ASEAN, Uni Eropa, atau Uni Afrika, dapat menjadi pemicu, pembatas, maupun peluang dalam proses pengambilan keputusan luar negeri.

Persepsi terhadap lingkungan regional bersifat subjektif dan sangat tergantung pada pengalaman sejarah, hubungan bilateral, serta ekspektasi terhadap masa depan. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri yang merespons faktor regional tidak selalu bersifat rasional dalam arti kalkulasi biaya-manfaat semata, melainkan juga dibentuk oleh persepsi, identitas, dan memori kolektif.

Dalam banyak kasus, ancaman atau tekanan regional dipersepsikan lebih mendesak daripada faktor global karena kedekatan geografis dan dampak langsungnya terhadap stabilitas domestik. Pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan faktor regional dapat berimbas secara langsung maupun tidak langsung terhadap negara-negara di regionalnya.

#### **1.5.1.2.3. Hubungan Bilateral**

Hubungan bilateral adalah hubungan yang terjalin dua arah antara pemerintah dengan aktor lain, seperti institusi atau organisasi global dan juga regional (Astuti, 2020). Kategori ini hanya menjelaskan hubungan suatu negara dengan institusi internasional lainnya. Hubungan yang terjalin ini dapat berupa kerjasama aliansi politik, perdagangan ekonomi, dan juga kerjasama di bidang pertahanan militer.

Hubungan ini terjalin dan memberikan tekanan tersendiri kepada suatu pemerintah yang tergabung untuk tetap menaati kerjasama yang sudah disepakati sebelumnya.

Dalam kerangka teori kebijakan luar negeri, faktor internasional mencakup beragam variabel eksternal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh negara dalam merumuskan sikap dan tindakan di panggung global. Salah satu bentuk paling nyata dari faktor ini adalah hubungan bilateral, yaitu interaksi politik, ekonomi, militer, dan budaya antara dua negara. Hubungan bilateral dapat bersifat kooperatif, kompetitif, atau bahkan konflikual, dan dalam semua bentuknya, hubungan tersebut memainkan peran penting dalam membentuk prioritas dan arah kebijakan luar negeri suatu negara.

Secara teoretis, hubungan bilateral menjadi salah satu mekanisme utama bagi negara untuk mengejar kepentingan nasional secara lebih fleksibel dan strategis dibanding melalui organisasi multilateral. Melalui hubungan bilateral, negara dapat menjalin aliansi pertahanan, perjanjian perdagangan, atau kesepakatan politik yang menguntungkan kedua pihak. Hubungan ini tidak hanya mencerminkan kepentingan ekonomi atau keamanan semata, melainkan juga mencerminkan dinamika kepercayaan, persepsi ancaman, dan kedekatan nilai antarnegara.

Dalam konteks teori kebijakan luar negeri, hubungan bilateral merupakan sarana penting dalam membaca dan menanggapi struktur internasional. Misalnya, negara kecil atau menengah sering kali bergantung pada hubungan bilateral dengan

negara besar sebagai strategi penyeimbang dalam menghadapi tekanan global. Sebaliknya, negara besar menggunakan hubungan bilateral untuk memperluas pengaruh geopolitik mereka di kawasan-kawasan strategis. Hal ini menjadikan hubungan bilateral sebagai kanal penting bagi transfer pengaruh, kepentingan, dan bahkan ideologi.

Hubungan antarnegara, termasuk yang bersifat bilateral, tidak semata dipandu oleh logika rasional. Keputusan luar negeri juga dipengaruhi oleh persepsi subjektif para pemimpin, memori historis antarnegara, dan pengalaman diplomatik sebelumnya. Artinya, hubungan bilateral bukan hanya interaksi kebijakan formal, tetapi juga hasil dari persepsi dan interpretasi personal dan kolektif.

Eidenfalk menambahkan bahwa hubungan bilateral bisa memicu respons kebijakan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan rasional jangka pendek. Sebagai contoh, negara mungkin memprioritaskan hubungan dengan mitra lama meskipun secara ekonomi kurang menguntungkan, karena adanya faktor emosional, simbolik, atau politik dalam hubungan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri menjadi cerminan dari sejarah diplomatik dan narasi identitas nasional yang telah terbangun melalui hubungan bilateral.

Hubungan bilateral juga berfungsi sebagai sarana manajemen konflik atau penyelesaian krisis yang lebih cepat dibanding forum multilateral. Dalam situasi darurat internasional, saluran komunikasi bilateral sering menjadi kunci dalam

mencegah eskalasi konflik dan membuka jalan bagi diplomasi preventif.

Dengan demikian, hubungan bilateral merupakan salah satu pilar dalam konsep faktor internasional dalam teori kebijakan luar negeri. Ia tidak hanya memperkuat posisi strategis negara di arena global, tetapi juga membentuk bagaimana negara melihat dirinya dan pihak lain dalam lanskap internasional yang terus berubah.

#### **1.5.1.2.4. Aktor-aktor non-negara**

Menurut Joakim, dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, aktor negara tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan berada dalam lingkungan kompleks yang dipenuhi tekanan dan pengaruh dari berbagai aktor non-negara. Ia menegaskan bahwa aktor non-negara berfungsi sebagai agen normatif dan informasi, yang bisa memengaruhi pemaknaan negara terhadap kepentingan internasional. Misalnya, NGO dapat menciptakan tekanan moral terhadap pelanggaran hak asasi manusia, sementara media internasional dapat memunculkan krisis persepsi yang mendorong respons kebijakan luar negeri yang cepat dan terbuka.

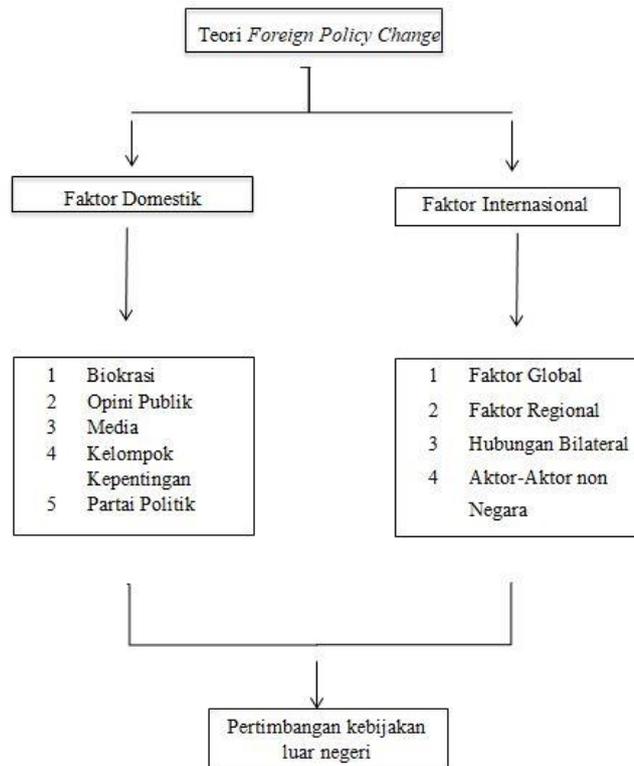
*Non-state actor* atau aktor non-negara adalah aktor transnasional. Joakim menjelaskan beberapa aktor tersebut seperti jaringan teroris, jaringan kriminal, korporasi, organisasi hak asasi manusia, dan sebagainya. Aktor non-negara adalah aktor yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara tanpa merepresentasikan dirinya sebagai negara.

Contoh nyata yang Joakim angkat dalam kerangka teoretisnya adalah ketika negara harus memilih antara kepentingan ekonomi nasional dengan tekanan dari organisasi internasional atau opini global terkait isu lingkungan atau kemanusiaan. Dalam hal ini, keputusan kebijakan luar negeri sering kali merupakan hasil kompromi antara tujuan strategis negara dan tekanan dari aktor non-negara yang bekerja di ranah internasional.

Dengan demikian, dalam pandangannya, aktor non-negara bukanlah entitas pinggiran, melainkan komponen penting dalam lingkungan internasional yang membentuk konteks pengambilan keputusan. Mereka menjadi bagian dari proses intersubjektif yang memengaruhi definisi ancaman, peluang, dan legitimasi tindakan luar negeri suatu negara.

## 1.7. Sintesa Pemikiran

Gambar 1. 2 Sintesa Pemikiran



Teori *Foreign Policy Change* adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami mengapa dan bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara berubah seiring waktu (Husna, 2022). Perubahan ini bisa terjadi secara radikal (misalnya berbalik arah dari sebelumnya) atau inkremental (bertahap). Teori ini menyatakan bahwa pengambilan sebuah kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi adalah Faktor Domestik atau faktor dari dalam dan faktor internasional atau faktor dari luar. Faktor domestik dipengaruhi Birokrasi, Opini Publik, Media, Kelompok Kepentingan dan juga Partai Politik sedangkan Faktor Internasional dipengaruhi oleh Faktor Global,

Faktor regional, Hubungan Bilateral dan aktor-aktor non-negara. Berbagai Faktor yang mendukung dalam pengambilan sebuah kebijakan luar negeri ini mampu dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan luar negeri suatu negara (Rose, 1998).

Teori Foreign Policy Change tidak hanya menyoroti bahwa kebijakan luar negeri bisa berubah, tetapi juga menjelaskan bagaimana proses perubahan itu terjadi secara sistematis. Joakim Eidenfalk (2009) turut menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan hasil interaksi antara tekanan domestik dan dinamika internasional. Proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh kemampuan suatu negara untuk menyeimbangkan kepentingan internal, seperti stabilitas ekonomi, legitimasi politik, dan tekanan kelompok kepentingan, dengan tuntutan dan tantangan eksternal seperti konflik internasional, perubahan dalam sistem internasional, serta tekanan dari organisasi multilateral.

Faktor domestik dapat bertindak sebagai katalisator perubahan ketika terjadi dinamika signifikan, misalnya perubahan pemerintahan, lonjakan opini publik terhadap isu luar negeri, atau tekanan dari media massa dan partai oposisi. Dalam sistem demokrasi, peran partai politik dalam pemerintahan dan oposisi memiliki potensi besar untuk mempengaruhi arah kebijakan luar negeri, baik melalui mekanisme legislasi maupun pembentukan opini masyarakat. Di sisi lain, faktor eksternal seperti ancaman keamanan, krisis global, atau tekanan diplomatik dapat memaksa negara untuk mengubah posisinya agar tetap relevan atau aman secara strategis.

Dalam situasi tertentu, negara cenderung melakukan perubahan secara radikal, yakni mengubah arah kebijakan secara drastis sebagai respons terhadap tekanan besar. Namun lebih sering terjadi perubahan secara inkremental, yaitu bertahap, sebagai hasil dari proses kompromi antara berbagai kepentingan yang saling tarik-menarik. Oleh karena itu, teori ini menawarkan alat analitis yang kuat untuk memahami bahwa kebijakan luar negeri bukanlah keputusan tunggal yang rasional dan linier, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara struktur domestik dan lingkungan internasional yang terus berubah (Eidenfalk, 2009)

#### **1.7.1. Argumen Utama**

Adapun faktor mempengaruhi dalam kebijakan yaitu faktor domestik dan faktor Internasional. Faktor domestik dipengaruhi Birokrasi, Opini Publik, Media, Kelompok Kepentingan dan juga Partai Politik. Birokrasi yang terjadi pada Slovakia dipengaruhi oleh Kementrian Energi, Lingkungan, dan Perdagangan yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan impor kilang minyak. Opini publik membawa pengaruh terhadap pengambilan keputusan Slovakia terkait impor rusia menjadi penyebab kekhawatiran masyarakat terhadap harga energi akibat embargo yang semakin naik dan mendukung kelanjutan impor minyak Rusia demi stabilitas ekonomi. Media di Slovakia memainkan peran ganda dalam membentuk opini publik mengenai kebijakan energi. Dalam membentuk opini publik, media memiliki peran penting dan mampu menekan pembuat kebijakan seperti Media nasional slovakia yaitu Dennik N, SME berupa media cetak dan TA3 yaitu saluran

televisi, media sosial seperti Youtube, Facebook dan telegram untuk menyebar narasi, media internasional seperti Reuters, Politico dan lain-lain. Sebagai kelompok kepentingan berat, yang mengandalkan pasokan energi murah dan stabil, cenderung mendorong pendekatan pragmatis terhadap Rusia dan UE. Spektrum partai politik di Slovakia sangat menentukan arah kebijakan minyak. Partai Smer-SD dipimpin oleh Robert Fico, dikenal pro-Rusia dan anti-sanksi, mendorong impor minyak Rusia tetap berjalan demi stabilitas ekonomi. Partai pro-UE seperti *Progresívne Slovensko* cenderung mendukung embargo Rusia dan mempercepat transisi energi.

Faktor internasional menjadi empat kategori yaitu, Faktor Global, Faktor regional, Hubungan Bilateral dan aktor-aktor non-negara. Faktor global yang terjadi adalah adanya Invasi Rusia ke Ukraina dan dampaknya terhadap fluktuasi harga minyak global. Secara geografis, faktor regional Slovakia terletak di Eropa Tengah dan berbatasan dengan negara-negara seperti Hungaria, Ceko, dan Ukraina. Ketergantungan Slovakia pada pipa Druzhba yang melintasi Ukraina menjadikan stabilitas regional sangat penting bagi keamanan energi negara ini. Ketegangan atau gangguan di wilayah ini dapat langsung mempengaruhi pasokan minyak ke Slovakia. Hubungan bilateral yang menjadi faktor dipengaruhi oleh adanya ketergantungan minyak dan memainkan peran penting dalam kebijakan Impor Rusia dan UK. Adanya Faktor Aktor non negara dibuktikan dengan adanya Perusahaan energi Slovaft, anak perusahaan dari MOL Group yang berbasis di Hongaria, memainkan peran signifikan dalam kebijakan energi Slovakia.

## **1.8. Metodologi Penelitian**

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Secara garis besar Hubungan Internasional adalah penelitian yang lebih menekankan pada fenomena-fenomena sosial dan melakukan pendekatan dengan cara sosial pula. Hubungan internasional adalah sebuah studi yang mengkaji bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain atau masyarakat melampaui batasan-batasan antar negara mencakup hubungan politik, ekonomi dan sosial (Charles A. McClelland, 2015). Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif dengan tujuan mengungkapkan sebuah sebab akibat pada peristiwa dan fenomena yang terjadi secara deskriptif mengkaji lebih dalam dengan bantuan teori-teori yang sudah dikemukakan para ahli pada sub-bab Landasan Teori.

### **1.8.2. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini lebih berfokus jangkauan tahun 2022 – 2024. Awal tahun 2022 dipilih penulis karena menjadi awal Invasi Rusia terhadap Ukraina yang menjadi alasan utama terjadinya problematika antara Rusia, Ukraina dan negara-negara anggota UE lain khususnya Slovakia. Dan periode pada periode tahun tersebut adalah periode dimana Slovakia melakukan berbagai kebijakan untuk tetap menjaga Kepentingan Nasionalnya. Periode waktu tersebut juga dipilih oleh penulis untuk mengkaji respon dari dari Rusia dan juga negara – negara UE Pasca diterbitkannya Sanksi keduabelas pada pertengahan bulan Desember tahun 2024.

### **1.8.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ini bersifat Kualitatif, dimana penulis lebih berfokus untuk melakukan tinjauan Pustaka melalui kajian literatur yang tersedia di buku, dokumen resmi, jurnal, artikel terkait dan informasi dari internet yang relevan dan dapat di pertanggungjawabkan mengenai masalah yang diteliti.

### **1.9. Sistematika Penulisan**

Pada penyusunan penelitian ini, terdapat susunan sistematika penulisan untuk memberikan deskripsi dan gambaran pada setiap bab pembahasan, adapun susunan sistematika penulisan ini yaitu :

- a. Bab I : Bab I ini berfokus pada pembahasan latar belakang masalah yang ada di penelitian ini.
- b. Bab II : Bab 2 ini mengkaji Faktor Internal yang berpengaruh pada slovakia yang menyebabkan ketergantungan impor minyak rusia.
- c. Bab III : Bab 3 ini mengkaji informasi lebih dalam faktor eksternal yang berpengaruh pada slovakia khususnya pada kebijakan yang terjadi di dunia internasional.
- d. Bab IV : Bab IV ini menyimpulkan apa saja yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya sekaligus saran